

BAB III

IMPLEMENTASI KHITTAH: *DINAMIKA INTERNAL*

Setelah melihat latar belakang keputusan Khittah pada bab sebelumnya, dalam bab-bab selanjutnya akan dilihat berbagai implikasi khittah, dan bagaimana konsepsi khittah itu diimplementasikan. Bab III ini akan mengulas tentang implementasi khittah dalam dinamika internalnya. Pada bagian pertama, akan dilihat perjalanan umum khittah selama kurun waktu sepuluh tahun ini, serta berbagai kesulitan dalam rangka sosialisasi khittah dan pemantapannya. Selanjutnya, pembahasan akan dibawa pada persepsi warga NU tentang keputusan Khittah itu. Dan pada bagian akhir, akan dikupas mengenai konsekuensi organisatoris internal Khittah.

A. PERJALANAN KHITTAH

Pada dasarnya, perjalanan kembali ke khittah ini dapat diperiodisasikan dalam dua tahapan. Tahap *pertama* yang meliputi masa 1984-1989 adalah periode sosialisasi dan konsolidasi khittah. Dan pada tahap *kedua* dari tahun 1989 hingga sekarang adalah periode pemantapan khittah.

Tahap lima tahun pertama dapat dikatakan mewarisi

warna-warna reorientasi program, regenerasi, dan rekonsolidasi dari Muktamar Situbondo. Ketiga hal ini adalah sub-sub tema yang mengikuti *grand* tema "Kembali ke Khittah 1926",¹ yang bukan saja telah membawa NU kepada perwajahan baru, namun juga mengantarkannya kepada era yang sarat dengan permasalahan dan persilangan kepentingan. .pm7

Kondisi ini menyebabkan PB Tanfidziyah NU yang merupakan produk hasil riil dari pelaksanaan program yang telah disusun. Mereka masih berkutat dengan persoalan sosialisasi khittah untuk menyamakan persepsi semua pihak dalam NU, yang ternyata menjadi pekerjaan yang sangat rumit dan kompleks.

Regenerasi dalam NU sendiri tidak dapat dipahami sekadar sebagai regenerasi antar-waktu ketika pengurus sebelumnya yang telah senior dan cukup lama memegang kendali meski diganti yang lebih muda. Regenerasi yang membawa nama-nama Abdurrahman Wahid, Mahbub Djunaedi, dan Fahmi Saifuddin, serta seterusnya ini dilatar-belakangi permasalahan yang jauh lebih besar daripada kepengusan. *Backdrop* proses ini adalah berkaitan dengan maraknya konflik internal NU di masa sebelumnya, yang kurang-lebih berpola sebagai konflik antara kelompok politisi dan non-

¹Lihat Bab II di muka, khususnya sub bab NU Menuju Format Baru: Muktamar Situbondo 1984.

politisi yang secara populer disebut sebagai Konflik Cipete-Situbondo.

Konflik yang memang nyaris akut ini pada akhirnya melahirkan kesadaran para ulama dan warga NU akan perlunya dimunculkan figur baru dalam teras kepemimpinan NU. Figur baru itu haruslah berada pada posisi netral dalam peta konflik NU, disamping harus mampu menjadi representasi semangat khittah. Berdasarkan dengan kriteria diatas, maka tujuh kyai senior NU yang dikomandoi oleh KH. As'ad Syamsul Arifin dalam lembaga *ahlu halli wal 'aqdi* menunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah. Tokoh ini bukan hanya netral, tetapi ia juga secara serius lebih turut mengupayakan rekonsiliasi kedua kubu yang berkonflik sebelumnya. Selanjutnya, dia adalah sebagai sosok sentral dalam perumusan konsep kembali kepada khittah 1926.² Dalam banyak hal, ia dipandang cukup mewakili citra NU baru yang hendak dimunculkan.

Dengan segala latar-belakang ini, maka tugas kepengurusan baru NU untuk melakukan sosialisasi khittah menjadi tidak mudah, sebab bias-bias konflik politisi dan ulama non-politisi ternyata masih bersisa dalam tubuh NU.

Salah satu hal yang harus dijelaskan kepada warga

²Dia adalah salah seorang anggota Majelis 24 yang pada Mei 1984 telah membentuk sebuah "Tim Tujuh Untuk Pemulihan Khittah". Tim ini diketuai oleh Abdurrahman. Lihat Ibid.

adalah bahwa Khittah mengamanatkan ditinggalkannya baju kepolitikan praktis NU dan dilepaskannya keterikatan NU dengan organisasi politik manapun. Tentang ini, adalah kompetensi Bab IV untuk membahasnya. Namun gambaran persoalan yang muncul dapat diikhtisarkan bahwa kelompok politisi dalam NU ternyata masih menyimpan keinginan untuk membawa organisasi ini kembali pada kepolitikan praktis, yang misalnya memunculkan gagasan Mahbub Djunaedi tentang "Khittah Plus" beberapa bulan setelah Pemilu 1987. Lontaran pemikiran serupa ini sangat mengganggu langkah Abdurrahman Wahid dan semua orang yang berada pada arus baru NU, yang dalam setiap kesempatan baik melalui pesantren-pesantren maupun kepada warga NU tentang amanat khittah dalam segala implikasinya. Gagasan ini akhirnya harus berhadapan dengan berikade yang mencegahnya agar tidak menjadi epidemi baru. Sementara itu dalam Pemilu 1987 Mahbub Djunaedi dan kelompoknya telah membuat ulah dengan apa yang kemudian disebut aksi pengembosan PPP, yang menyimpang dari garis netralisasi NU, dan untuk beberapa waktu, dengan tidak menyebutnya sampai saat ini, membawa sebagian warga NU pada penafsiran yang salah bahwa Khittah berarti eksodus dari PPP ke Golkar.

Menyadari gagasannya dihalangi oleh Abdurrahman Wahid, Mahbub Djunaedi lalu menyusun serangkaian upaya bawah tanah untuk menggeser Abdurrahman Wahid atau bahkan

menon-aktifkannya sama sekali. Ia berusaha melobi beberapa kyai senior seperti KH. As'ad Syamsul Arifin. Namun jelas tidak terlalu mengherankan jika Mahbub Djunaedi gagal meyakinkan mereka akan gagasan Khittah Plus-nya. Kendati begitu, beberapa kyai setuju dengan gagasan untuk menggeser Abdurrahman Wahid, sebab mereka menilaiya sering mengeluarkan pendapat yang aneh-aneh seperti pendapatnya bahwa pendidikan agama cukup di rumah dan tidak perlu di sekolah, penggantian Assalamu 'alaikum dengan selamat pagi, siang dan malam, disamping bahwa dia dianggap kurang bisa mengorganisir NU, sehingga NU tidak bisa menghimpun dana untuk melaksanakan Mukhtar 1984.³ Maka pada tanggal 7 Nopember 1987 di rumah KH. Mujib Ridwan yang merupakan tempat berdirinya NU di Surabaya, diadakan rapat Mustasyar yang membahas kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Namun pertemuan itu gagal menghasilkan keputusan karena hanya dihadiri oleh KH. As'ad, KH. Masykur, H. Imron Rosadi, dan KH. Mudjib sendiri.⁴ Selanjutnya, upaya menggeser Abdurrahman Wahid melalui forum Munas dan Konbes NU di Cilacap pada bulan yang sama kembali menemui kegagalan. Sekalipun sejumlah kyai "konservatif" NU berusaha untuk menggesernya, namun Abdurrahman Wahid ternyata masih

³Lihat Tempo, 21 Nopember 1987, h. 25-26.

⁴I b i d.

ulama (KH. As'ad Syamsul Arifin).

Di kalangan NU sendiri, waktu lima tahun bukanlah periode yang memadai untuk memberikan pemahaman tentang konsep Khittah 1926. Sekian puluh juta massanya yang tidak dapat disebut homogen di pelbagai kota di Indonesia. Keadaan ini menuntut waktu yang relatif panjang untuk melakukan konsolidasi dan sosialisasi khittah dikalangan warga NU termasuk basis-basisnya di wilayah pedesaan. Dalam pidato Konferensi Wilayah Jawa Timur di Situbondo pada bulan Agustus 1988, Abdurrahman Wahid mengakui bahwa heteroginitas warga NU telah menimbulkan perbedaan pemahaman terhadap khittah, sehingga meskipun telah diputuskan, pelaksanaanya tidak bisa dipaksakan. Ia memperkirakan bahwa, "Kerja Khittah itu lama sekali, 15 sampai 20 tahun".⁶ Sementara bagi Yusuf Hasyim, masih banyak penyimpangan terhadap semangat khittah sangat berkaitan dengan belum lengkapnya petunjuk pelaksanaan khittah sendiri.⁷ Lebih jauh permasalahan tersebut agaknya juga disebabkan oleh ketiadaan perangkat yang mampu menjabarkan program 5 tahunan NU ke dalam kegiatan-kegiatan operasional dari tingkat pusat sampai ranting-ranting di pedesaan. Akibatnya, banyak program-program itu hanya

⁶ Tempo, 3 September 1988, h. 27.

⁷ I b i d.

berhenti pada rumusan ideatif.

Karena itu, Mukhtamar ke-28 yang kemudian diletakkan di Yogyakarta, Nopember 1989, merupakan momentum yang tepat untuk menilai kembali semua program yang ada. Hanya saja muktamar ini juga menjadi ajang konstitusional bagi keinginan untuk mendongkel Abdurrahman Wahid. Beberapa hari sebelum muktamar, KH. As'ad Syamsul Arifin melontarkan kritikan tajam. Dia menyatakan bahwa kepengurusan NU selama ini mengecewakan. Yang terjadi sama sekali bukan pengamalan untuk kembali kepada khittah 1926. Sebagai Mustasyar Aam, dia belum pernah menerima laporan selebarpun dari PB NU. Yang paling parah kata KH. As'ad Syamsul Arifin, musyawarah antar para pengurus dan kyai sepuh sangat kurang.⁸ Alasan itu sekali lagi dicari-cari. Anggaran Rumah Tangga NU 1984 yang saat itu berlaku sama sekali tidak menyebutkan keharusan Tanfidziyah memberikan laporan kepada Mustasyar yang merupakan badan penasehat. Berkaitan dengan pelaporan, pasal 21 ART tersebut mengatakan bahwa Pengurus Tanfidziyah sebagai pelaksana pimpinan sehari-hari mempunyai tugas menyampaikan laporan secara periodik tentang pelaksanaan tugas kepada Pengurus Syuriah. Tidak kepada Mustasyar.

Namun keinginan untuk menggeser Abdurrahman Wahid

⁸Lihat Tempo, 11 Nopember 1989.

terus mencari tema-nya, dan sejumlah kesalahan tokoh yang memiliki banyak kapasitas ini pun diinventarisasi. Mulai dari gagasan penggantian Assalamu'alaikum dengan selamat pagi (yang sebenarnya merupakan kesalahan pemberitahuan di media massa), menghadiri sidang LSM diluar negeri yang dikatakan cenderung menjelek-jelekan pemerintah, pidato di depan Sidang Raya PGI, bahkan kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta yang oleh KH. As'ad Syamsul Arifin disebut sebagai "Ketua Ketoprak".⁹ Posisi Abdurrahman Wahid kian dipersulit dengan munculnya nama Idham Khalid dalam bursa calon Rais Aam. Kelompok politisi, yang segera berbaris rapat di belakang Idham Khalid, seolah mendapat angin bahwa kehadiran tokoh politisi NU yang piawai ini akan membuka celah yang sekali lagi dapat dimanfaatkan untuk melapangkan jalan bagi keinginan mereka yang sempit kandas.¹⁰ Kesempatan Idham Khalid memang tampak cukup besar. Posisinya diamankan ketika ia terpilih kembali sebagai *Mundir Aam Jam'iyah Ahlit-tarikat al-Muktabarah* dalam muktamarnya di Demak, yang tiga hari sebelum dimulainya Muktamar NU di Krapyak Yogyakarta. Pemilihan waktu yang sangat dekat ini tagaknya disengaja agar Idham bisa dengan mudah mengkonsolidir pendukungnya menghadapi

⁹ Tempo, 25 Nopember 1985, h. 23.

¹¹ Ibid., h. 30-32.

persaingan di Krapyak. Namun kuatnya posisi Idham ini tidak lalu berarti bahwa sayap politisi NU bisa berharap banyak. Muktamar di Yogyakarta justru menjadi forum penegasan kembali keputusan Muktamar Situbondo. Hal ini bukan saja menjadi arus-besar dalam NU, namun juga secara luas didukung oleh elit-elit politik nasional. Tidak kurang dari Menteri Dalam Negeri Rudini, Gubernur Jawa Tengah Ismail, Menteri Agama, Munawir Sadzali, dan bahkan Ketua Umum Golkar Wahono, telah melontarkan harapan agar Muktamar NU ini dapat menegaskan keputusan kembali ke Khittah.

Selanjutnya, meskipun Abdurrahman Wahid menghadapi dua kelompok yang menentangnya, tapi dukungan baginya tidak kalah besar. Abdurrahman Wahid memang tidak memiliki kelompok pendukung khusus tertentu, namun ia telah membangun popularitas yang luas di daerah-daerah dengan banyak melakukan kunjungan ke wilayah dan cabang NU. Dalam sebulan, ia bisa sampai turun ke sepuluh daerah.¹¹ Popularitasnya juga didukung dengan kecendekiawanan yang sering hadir di berbagai seminar dan diskusi. Ia bukan saja didukung oleh generasi muda NU, namun sebagian besar kyai senior pun masih menjagokannya. Dukungan terpenting datang dari Rais Aam KH. Ahmad Siddiq dan *shohibul bait* Muktamar, KH. Ali Maksum. Dalam pertemuan Syuriah NU Jawa Timur di

¹²Tempo, 2 Desember 1989.

Probolinggo 14 Nopember, KH. Ahmad Siddiq secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Abdurrahman Wahid sebagai calon Ketua Umum PB NU, di samping menyatakan kesediaannya untuk dicalonkan kembali sebagai Rais Aam.¹² Pernyataan Kyai senior NU ini jelas merupakan kejutan. Bahkan bukan merupakan sesuatu hal biasa dalam NU membuat pernyataan seperti itu di depan umum. Dengan melakukan hal tersebut, KH. Ahmad Siddiq berarti mempertaruhkan popularitasnya. Barangkali itulah sebabnya sementara Abdurrahman Wahid akhirnya berkibar nyaris tanpa saingan dalam bursa percalonan, maka KH. Ahmad Siddiq hanya mencatat kemenangan yang tidak terlalu jauh terhadap Idham Khalid. KH. Ahmad Siddiq memperoleh 188 suara, dan Idham memperoleh 126 suara.¹³

Sekalipun akhirnya gagal memperoleh kursi Rais Aam, tapi kelompok Idham Khalid berhasil menempatkan salah satu orangnya, KH. Ali Yafie, sebagai wakil Rais Aam. Penempatan KH. Ali Yafie ini di kemudian hari ternyata membawa persoalan tersendiri bagi intern NU.

Terlepas dari adanya persoalan yang mengitari proses pencalonan mereka kembali, namun secara objektif duet

¹³ I b i d., h. 24.

¹² Lihat Kacung Marijan, Quo Vadis NU (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992), h. 184.

Abdurrahman Wahid-KH. Ahmad Siddiq agaknya merupakan figur paling tepat untuk memimpin NU. Keduanya memiliki latar-belakang pemikiran yang kosmopolit, karenanya tidak canggung dalam menghadapi modernisasi. Sementara mereka pada saat yang sama juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi ke-NU-an, maka mereka sangat paham bagaimana mengkomunikasikan proses modernisasi dalam idiom-idiom yang mudah dipahami oleh warga NU sendiri. Sementara untuk memasuki era berbangsa secara utuh, sesuatu yang dalam wawasan keislaman telah *diback-up* dengan konsep *ukhuwah wathoniyah*, maka merekalah yang paling mapuberdialog dengan berbagai pihak dari berbagai latar-belakang latar belakang yang beranekaragam.

Muktamar Krapyak sendiri membukakan beberapa catatan penting. Pertama adalah maraknya suasana konflik saat itu. Pasalnya tentu saja adalah KH. As'ad Syamsul Arifin yang tidak henti-hentinya menentang Abdurrahman Wahid. Ia bahkan menolak hadir di forum, dengan alasan sakit, sekalipun baginya telah disediakan helikopter yang akan membawanya pulang-pergi Situbondo-Yogja.¹⁴ Sulitnya, Abdurrahman Wahid seolah-olah tidak berusaha sungguh-sungguh untuk berusaha meredakan kemarahan KH. As'ad Syamsul Arifin. Abdurrahman Wahid bahkan seperti meladeni sulukan konflik KH. As'ad

¹⁴ Tempo, 2 Desember 1989, h. 24.

Syamsul Arifin ketika ia mencoret Anwar Nurris dari kepengurusan teras PB NU. Anwar Nurris adalah orang dekat KH. As'ad Syamsul Arifin yang pada tahun 1984, oleh KH. As'ad Syamsul Arifin ditempatkan sebagai Sekjen. Namun agaknya Anwar Nurris tidak bisa bekerja-sama dengan Abdurrahman Wahid, sehingga secara emosional Abdurrahman Wahid menilai Anwar Nurris sebagai pengacau yang mesti disingkirkan.¹⁵ Buntutnya meskipun KH. As'ad Syamsul Arifin ditempatkan sebagai Mustasyar Aam, menyatakan *mufarraqa* terhadap kepemimpinan Abdurrahman Wahid.¹⁶ Sebuah keputusan yang tidak pernah diralat hingga saat meninggalnya.

Catatan lain, di samping perubahan struktural disubordinasikannya Mustasyar dalam Syuriah, Muktamar Krpyak juga memulai sebuah tradisi baru dalam pemilihan pengurus baru. Di sini, Rais Aam dan wakilnya dipilih secara langsung. Sedangkan Ketua Umum Tanfidziyah juga dipilih secara langsung setelah disetujui oleh Rais Aam dan -----

¹⁶Lihat wawancara dengan Abdurrahman Wahid dalam **Editor**, 2 Desember 1989.

¹⁷Fathoni dan Zen, **Op. Cit.**, h. 170-173. *Mufarraqa* adalah sebuah istilah dalam fiqh shalat jamaah. Jika dalam shalat berjamaah seorang makmum melihat imamnya, karena satu dan lain hal, shalatnya batal sehingga tidak lagi layak menjadi imam, namun ia tetap melanjutkannya, maka makmum itu berhak untuk mengundurkan diri dari jamaah dan meneruskan shalatnya sendirian. Tindakan makmum ini disebut dengan *mufarraqa*.

wakilnya yang baru terpilih. Setelah ketiga jabatan itu, selanjutnya dipilih pula secara langsung empat orang mode formatur. Ketujuh orang terpilih inilah yang kemudian membuat formasi kepengurusan lengkap.¹⁷ Cara ini sama sekali berbeda dengan mekanisme ahlu halli wal-'aqdi sebelumnya yang mengandalkan otoritas kyai paling senior.

Lalu, dalam rapat pertama PB NU di Jombang pada bulan Januari 1990 diadakan pembidangan tugas masing-masing ketua, yang dimaksud agar masing-masing mampu melaksanakan program secara maksimal. Di lembaga syuriah, pembimbangan dilakukan atas komisi-komisi yang dipilih oleh para Rais. Di antaranya komisi sosial-ekonomi oleh KH. Munasir, Komisi Organisasi oleh KH. Aminuddin Aziz, dan seterusnya. Sedangkan Tanfidziyah dibagi dalam beberapa bidang, antara lain Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia diketuai oleh dr. Fahmi Saifuddin, MPH, Bidang Hubungan dengan Lembaga Keagamaan oleh Fathah Hasan, Bidang Pendidikan dan Kebudayaan oleh Asnawi Latif, dan sebagainya.¹⁸

Berselang setelah setahun Muktamar Krapyak, dalam masa yang relatif tenang, NU kembali diguncang persoalan. Januari 1991 KH. Ahmad Siddiq meninggal dunia dan menimbulkan masalah yang cukup serius tentang siapa yang

¹⁸ Lihat Ibid. h. 160.

¹⁹ Ibid., h. 163.

akan menggantikannya. Sebabnya adalah, rujukan untuk mengganti Rais Aam yang wafat sebelum habis masa jabatannya belum jelas. Pernah dua kali terjadi kasus seperti itu di masa lalu. Pertama, ketika KH. Wahab Hasbullah wafat, ia kemudian digantikan oleh wakilnya KH. Bisri Syamsuri. Kemudian ketika KH. Bisri sendiri wafat, kedudukannya digantikan oleh KH. Ali Maksud yang justru berada di luar jajaran pada Rais.

Sebenarnya pada pasal 25 Anggaran Dasar NU 1989 cukup memberikan kejelasan: apabila terjadi lowongan jabatan antar-waktu, maka lowongan tersebut diganti oleh anggota pengurus yang berada dalam urusan langsung di bawahnya. Jika ini diikuti, maka berarti KH. Ali Yafie yang menjadi Rais Aam. Tapi ternyata persoalannya tidak sesederhana itu. Begitu terdengar akan diterapkannya pasal tersebut, segera muncul tanggapan yang menolaknya. KH. Ma'ruf Amin, Katib Syuriah, menyatakan bahwa pasal 25 itu adalah sebuah ketentuan umum yang tidak secara khusus membahas jabatan Rais Aam, sehingga tidak dapat secara mutlak diberlakukan. Semua akhirnya bergantung kepada kesepakatan apakah jabatan tersebut akan diisi atau malah dibiarkan kosong. Jika diisi, maka kedudukan kedubelas Rais Syuriah adalah sama, sehingga bisa dipilih salah satu. Itu berarti tidak ada keistimewaan prioritas bagi KH. Ali Yafie. Namun jika dikosongkan, maka tugas, kewenangan dan tanggung-jawab Rais

Aam untuk sementara dibebankan kepada wakilnya. Ia tetap sebagai Rais Aam, tetapi menjalankan tugas Rais Aam, sampai diambil keputusan dalam forum yang lebih tinggi.¹⁹

Lalu pada tanggal 2 Februari, diadakan rapat Gabungan Syuriah dan Tanfidziyah. Di sini sebuah keputusan diambil untuk tidak menunjuk Rais Aam baru, dan hanya melimpahkan tugas, tanggung-jawab, hak dan wewenangnya kepada wakil Rais Aam KH. Ali Yafie. Keputusan yang dinyatakan berlaku sampai dilaksanakannya Muktamar 1994 ini lalu dikukuhkan dalam Raapat Pleno PB NU, 18 dan 19 Mei.²⁰

Pada bulan Nopember, NU diributkan telah menerima sumbangan sebesar 50 juta rupiah dari Yayasan Dana Bakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) yang mengelola SDSB. Sebenarnya sumbangan itu diberikan kepada Yayasan Hasyimiyah, sebuah yayasan pendidikan yang berafiliasi ke NU di Tuban. PB NU hanya sebatas memberikan rekomendasi yang dibuat oleh Sekjen Ghaffar Rahman dan ditanda-tangani oleh Ketua Umum Tanfidziyah. Masalahnya, penerimaan itu, pada tanggal 2 Nopember diekspos oleh media massa, termasuk TVRI, dan dikesankan bahwa seolah-olah NU menerima bantuan dari YDBKS.²¹ Maka protes berdatangan dari segala penjuru,

²⁰ Lihat Tempo, 2 Februari 1991, h. 23.

²¹ Lihat Tempo, 25 Juni 1991, h. 23.

²² Tempo, 16 Nopember 1991

intern dan ekstern NU.²²

KH. Ali Yafie yang tengah menghadiri pelantikan ICMI di Bali banyak mendapatkan pertanyaan tentang persoalan tersebut, keesokan harinya. KH. Ali Yafie sangat terkejut dengan pertanyaan itu, segera kembali ke PB NU di Jakarta dan mencari penjelasan. Rupa-rupanya di sini ia mendapatkan bukti penting bahwa, menurutnya, surat yang ditanda-tangani oleh Abdurrahman Wahid bukan sekedar surat rekomendasi, tapi sudah merupakan permintaan bantuan. Maka esoknya, 5 Nopember, Rapat Gabungan Syuriah dan Tanfidziyah, yang tidak dihadiri Abdurrahman Wahid karena berada di luar negeri sejak dua hari setelah penanda-tanganan surat rekomendasi itu, dikejutkan oleh ketidak-hadiran KH. Ali Yafie. Yang datang adalah utusan KH. Ali Yafie dengan membawa surat pengunduran dirinya, hingga semua yang terlibat dalam penerimaan dana itu ditindak, dan dana tersebut dikembalikan.²³

Setelah kedatangannya dari luar negeri Abdurrahman Wahid meminta maaf dan mengajukan tiga usulan untuk menyelesaikan kemelut di NU. *Pertama*, menolak permintaan

²³Reaksi paling keras, uniknya, datang dari Wilayah NU Jawa Timur. Bahkan salah satu kepengurusan cabang di wilayah itu, PC NU Sumenep, menyatakan membekukan diri dari segala kegiatan, sampai persoalan "dana haram SDSB" di selesaikan hingga tuntas.

²⁴I b i d.

KH. Ali Yafie untuk mengundurkan diri. Sebab sebagai Wakil Rais Aam, ia dipilih oleh Mukhtar sehingga pengunduran dirinya hanya bisa diterima melalui forum yang sama. *Kedua*, menerima pengunduran Ghaffar Rahman dari jabatan Sekjen PB NU. Dan *ketiga*, kesalahan Ketua Umum cukup diberi peringatan keras, tidak perlu pemecatan. Dan dengan keputusan ini KH. Ali Yafie merasa puas, kendati menunggu kelanjutannya.²⁴ Perjalanan selanjutnya, karena adanya kurang puasan KH. Ali Yafie terhadap keputusan diatas, maka diadakanlah pertemuan tanggal 6 Desember antara, KH. Ali Yafie, Abdurrahman Wahid, Ma'ruf Amin, dan Ichwan Sam (Wakil Sekjen PB NU) hingga melahirkan **Maklumat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama**, sebuah surat terbuka yang menyatakan bahwa persoalan penerimaan bantuan dari YDBKS telah dianggap selesai, dan ".... tetap mengakui KH. Ali Yafie sebagai Wakil Rais Aam PB NU". Sementara itu, Junaidi Abdullah, ketua Yayasan Hasyimiyah, dipecat dari jabatannya sebagai Katib Syuriyah PC NU Tuban.²⁵

Tapi ternyata, masalah ini terus bergulir, bahkan KH. Ali Yafie menolak menghadiri Konferensi Besar dan Musyawarah Nasional NU di Bandarlampung, 12 sampai 26 Januari 1992. Oleh karena itu, diutuslah KH. Wahid Zaini

²⁴Tempo, 23 Nopember 1991

²⁶Tempo, 14 Desember 1991

yang kala itu menjabat sebagai Ketua *Rabithatul Maahidil Islamiyah* (RMI, organisasi pesantren-pesantren NU) untuk menemui KH. Ali Yafie di Jakarta. Namun, KH. Ali Yafie menolak dan hanya memberikan surat yang harus disampaikan Wahid Zaini pada forum konbes dan munas.

Pada surat tersebut, KH. Ali Yafie mengulangi lagi pengunduran dirinya dengan disertai tiga syarat jika dipenuhi akan tetap kembali pada posisi semula. *Pertama*, Sekjen Ghaffar Rahman, diberhentikan secara penuh. *Kedua*, harus ada bukti tertulis pengembalian dana YDBKS sebesar 50 juta rupiah. Dan *ketiga*, Abdurrahman Wahid meski diskors selama masa satu tahun.²⁶ Namun menurut para peserta munas dan konbes, apa yang dikemukakan oleh KH. Ali Yafie tersebut ditafsirkan sedang memfait-accomplikan pengunduran dirinya pada konbes.

Regitulah, akhirnya rapat yang dihadiri oleh 6 anggota PB dan 24 wakil PW ini mulai mencari siapa pengganti KH. Ali Yafie. Melalui serangkaian perdebatan akhirnya naiklah nama KH. Ilyas Ruhiyat sebagai Rais Aam dengan memperoleh 7 suara dan 5 suara untuk KH. Sahal Mahfudz. Selain itu, konbes juga menaikkan Ichwan Sam pada kursi Sekjen menggantikan Ghaffar.²⁷

²⁷Tempo, 1 Februari 1992, h. 23.

²⁸I b i d., h. 26

Tidak ada perubahan yang terlalu prinsipil dengan naiknya Ichwan Sam menggantikan Ghaffar Rahman, sebab keduanya sama-sama mendukung keberadaan Abdurrahman Wahid. Berbeda halnya ketika Anwar Nurris yang tangan kanan KH. As'ad Syamsul Arifin digantikan Ghaffar Rahman di Krapyak, yang merupakan pembersihan ganjalan langkah Abdurrahman Wahid. Yang perlu dicatat khusus adalah bahwa dengan mundurnya KH. Ali Yafie maka *inner circle* NU mulai bersih dari kubu Idham Khalid. KH. Ilyas Ruhiyat sendiri dikenal sebagai seorang yang, sebagaimana Abdurrahman Wahid, netral dari tarik-menarik konflik ulama-politisi. Ia banyak digambarkan sebagai seorang yang *low profile* dan selalu berfikir *positive thinking*. Sehingga walaupun tidak bisa mendampingi dan mendukung Abdurrahman Wahid sebagaimana KH. Ahmad Siddiq, setidaknya tidak akan menghalangi langkah Abdurrahman Wahid. Sementara orang kedua di Syuriah, KH. Sahal Mahfudz pada umumnya memiliki cara berfikir yang sama dengan Abdurrahman Wahid. Dukungan Sahal Mahfudz kepadanya dirumuskan dalam sebuah penilaian bahwa ia adalah seorang ekseponen yang punya komitmen tinggi terhadap Khittah 1926 dan juga memiliki wawasan yang luas.²⁸

Proses Muktamar ke-29 Nahdlatul Ulama (NU) di Cipasung Tasikmalaya, 1-5 Desember 1994, telah diikuti

²⁸Lihat *Tempo*, 1 Februari 1992, h. 24.

secara seksama oleh muktamirin maupun pengamat. Sejak sebelum muktamar hingga pembukaan yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan penutupan oleh Wakil Presiden, Try Sutrisno, dinamika penentuan figur keagamaan (jam'iyah diniyah) itu juga telah memperoleh perhatian berlebihan. Perhatian terhadap kandidat PBNU mengalahkan pemberitaan dan perhatian terhadap masalah-masalah penting lain, yang terangkum dalam aktualisasi Khittah 1926 sebagai tema Muktamar.

Tentu ada banyak alasan, mengapa fokus muktamar NU kali ini tersedot kepada soal kandidat PBNU.²⁹ Spekulasi kemunculan kembali tokoh senior KH. DR. Idham Chalid dan upaya kubu politikus (bukan lagi terbatas Kubu Cipete) untuk menguasai kepengurusan NU di pusat -di satu sisi- dan upaya-upaya untuk terutama menyingkirkan K.H. Abdurrahman Wahid dari jabatan Ketua Umum PBNU -di sisi lain- menjadi alasan penting bagi fokus muktamar.

Spekulasi kemunculan Idham Chalid ternyata pupus, karena hanya mengantongi 1 suara pada tahap pencalonan Rois

³⁰ Mengenai kecenderungan eksploitasi sekitar kandidat figur dalam jajaran PBNU, sebenarnya juga tidak akan lepas dari kontribusi media massa yang senantiasa memberikan porsi lebih atas persoalan ini. Seputar peliputan dalam muktamar, lihat Nuruddin Amin, **Muktamar NU dalam Liputan Pers**, dalam M. Fajrul Falaakh, et.al, **Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU** (Yogyakarta:Titian Ilahi Press, 1997)

Aam. Pendek kata, KH. Ilyas Ruhiyat (250) suara dan KH. Sahal Mahfudh (101 suara) akhirnya dipercaya mengemban amanat sebagai Rais Aam dan Wakil Rais Aam untuk masa bakti 1994/1999. Namun tidak berarti masalah figur PBNU kurang menarik untuk diikuti.

Di tengah indikasi intervensi pihak luar dan aneka manuver yang mengejutkan dari Abu Hasan (pesaing utama KH. Abdurrahman Wahid), penentuan ketua umum telah menyedot perhatian luar biasa. Ketika pemilihan memuncak, perolehan suara 157 untuk Abdurrahman Wahid dan 136 untuk Abu Hasan menegangkan. Akhirnya, 17 suara untuk Fahmi D. Saifuddin "berpindah" ke Abdurrahman Wahid hingga menjadi 174 suara, dan 6 suara untuk Chalid Mawardi "pindah" ke Abu Hasan hingga menjadi 142 suara.

Akumulasi suara Abu Hasan itu tentu mudah dibaca sebagai koalisi kubu politikus. Kemungkinan besar, fenomena tersebut dibaca oleh anggota empat formatur (Rais Aam, Wakil Rais Aam, dan Ketua Umum terpilih, serta PWNU Jawa Timur); namun tidak demikian dengan anggota formatur dari Aceh. Karena itu, dapat dipahami, mengapa tuntutan Abu Hasan melalui anggota formatur dari Aceh tidak terpenuhi.

Chalid Mawardi dan Abu Hasan tidak terakomodasi dalam komposisi PBNU yang ditetapkan formatur hasil Mukhtamar, Selasa 13 Desember 1994, tentu juga dapat dijelaskan dari keinginan kuat anggota formatur untuk

melakukan konsolidasi dalam tahap aktualisasi Khittah 1926.

Ini juga dibuktikan, dr. Fahmi D. Saifuddin tetap dimasukkan sebagai Ketua Tanfidziyah dan sejumlah nama baru (KH. Wahid Zaini) ditempatkan dalam jajaran fungsionaris untuk lima tahun mendatang.

Penunjukan nama-nama baru dalam jajaran PBNU hasil muktamar tampak mempertimbangkan representasi luar Jawa (jika ini juga menjadi faktor menguatnya dukungan kepada Abu Hasan, orang Jambi yang telah lama berbisnis di Jakarta).³⁰ Hal itu sangat nyata dengan pencantuman Syeikh Mukhtar Muda Nasution (Sumut), Tuan Guru Zaini (Martapura, Kalimantan), KH. Ali Syibromalisi (Sulawesi), dan KH. Usman Abidin (Bima) dalam jajaran Mustasyar.

Di jajaran Syuriah tercantum nama-nama KH. Baco (Sulawesi) dan KH. Mukeri Ghawith (Kalimantan) dan DR. Sayid Agil Munawar (Sumsel), sedangkan untuk Tanfidziyah terdapat, misalnya, Ir. Kiemas Madany Idrus (Sumsel), Muhyiddin Arubusman (Bima) atau Ishartanto, SE (Sumbar).

Namun yang lebih penting untuk dicermati adalah kombinasi ulama-akademisi, lapisan tiga kelompok usia, dan pengusaha dalam jajaran PBNU kali ini. Untuk kategori pertama, terdapat nama-nama baru seperti DR. Nachrawi

³¹Mengenai formasi kepengurusan PBNU pada periode ini, lihat dalam lampiran.

Abdussalam, KH. Drs. Tilchah Hasan, DR. Said Agil dan M. Fachri Thoha, LC dalam jajaran Syuriyah, serta DR. cecep Syarifuddin di Tanfidziyah. Untuk kategori kedua, antara lain terdapat Muhyiddin Arubusman dan Drs. Arifin Junaidi, MBA. Sedangkan Ishartanto, SE dan H. Imam Syafii adalah pengusaha-pengusaha potensial yang meraih sukses secara mandiri.

Bagaimanapun, mungkin tidak banyak yang bersedia memahami kondisi NU dewasa ini dan tantangan yang dihadapinya bersama masyarakat dalam tahapan aktualisasi nilai Khittah 1926.

Ketidak-puasan Abu Hasan tentu dapat dimengerti, baik bila diukur dari biaya yang dikeluarkan untuk berkampanye menjadi ketua umum maupun dari kepentingan-kepentingan para pendukungnya. Ternyata kendatipun sudah ter-akomodirnya beberapa nama diatas, masih belum cukup "terobati". Hal ini dapat kita lihat dengan dilaksanakannya Mukttamar Luar Biasa (MLB) pada tanggal 17 Januari 1996 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dan akhirnya melahirkan PBNU tandingan.³¹

Sampai disini, mengamati peta hegemoni NU secara

³²Bagaimana manuver yang dilakukan oleh Abu Hasan dalam Mukttamar di Cipasung, serta lahirnya KPPNU (Koordinasi Pimpinan Pusat Nahdlatul Ulama) sebagai PBNU tandingan, bahkan Choirul Anam mengkategorikan aksi Abu Hasan dengan gerakan pengacau keamanan. lihat pada, Drs. Choirul Anam, Membanding Ulah GPK Abu Hasan (Surabaya: Majalah Aula, 1996)

lambat-lambat mengingatkan pada pola distribusi kekuasaan nasional para era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan adanya segitiga Sukarno-PKI-Angkatan Darat. Maka dalam NU segitiga serupa kurang-lebih juga muncul, yang memiliki sudut-sudut Abdurrahman Wahid - kelompok politisi - kelompok ulama. Abdurrahman juga serupa dengan Sukarno ketika ia tidak memiliki basis dukungan khusus tertentu, dan lebih mengandalkan popularitasnya yang luas dikalangan warga. Selanjutnya, konflik dan persaingan antara kelompok politisi dan kelompok ulama membuat mereka secara sendiri-sendiri tidak akan mampu menyaingi hegemoni Abdurrahman Wahid. Satu lagi kemiripan yang terjadi pada segitiga kekuasaan Demokrasi Terpimpin kala Sukarno terus-menerus berusaha menjaga keseimbangan antara Angkatan Darat dan PKI untuk mengamankan kekuasaannya. Namun analogi tidak mampu meroket ke atas menyaingi kekuasaan Sukarno, maka demikian pulalah andai dari salah satu anggota politisi atau kelompok ulama runtuh maka yang lain akan mampu menggeser kekuasaan Abdurrahman Wahid. Rasanya mustahil pengelompokan itu akan dapat hilang, sebab kekuasaan bukan merupakan lembaga tapi lebih sebagai karakter. Hanya saja jika kedua kubu benar-benar bersatu dalam sebuah koalisi yang valid, maka boleh jadi posisi Abdurrahman Wahid akan goyah. Tapi kemungkinan ini agak kecil. Memang di waktu lalu seolah terjadi kekompakan antar politisi dan kelompok ulama ketika

Mahbub dan kawan-kawan berhasil melobi beberapa kyai senior untuk menggeser Abdurrahman Wahid. Namun kepemilikan mereka akan tujuan bersama, satu syarat penting sebuah koalisi, sangat minim. Sehingga mesti diakui bahwa Abdurrahman Wahid dengan segala kontroversialnya sampai saat ini masih belum tertandingi dalam bursa hegemoni NU.

Sehinga catatan akhir untuk bagian ini, pada pertengahan 1993 sejumlah tokoh muda NU melemparkan otokritik bahwa NU akhir-akhir ini semakin cenderung elitis dan kian jauh dari massanya. Lontaran pendapat orang-orang seperti Mustafa Zuhad dan MM Billah ini lalu mengundang serangkaian tanggapan. Sunyoto Usman,³² misalnya menganggap penilaian itu terlalu tergesa-gesa. Sunyoto dengan menunjuk beberapa program NU yang jelas-jelas diorientasikan kepada kepentingan warga seperti koperasi dan BPR-BPR, yakni bahwa NU masih memikirkan kepentingan umat. Bahwa ada di antara program-program itu yang tersendat, bahkan stagnan, itu lain soal. Sementara Kacung Marijan³³ menilai bahwa anggapan NU elitis itu ada benarnya juga. Ia mengingatkan bahwa pemilihan nama Nahdlatul Ulama --bukan Nahdlatul Ummah, misalnya-- menunjukkan bahwa elitisme adalah

³²Sunyoto Usman, *Masihkah NU Potensial Populis ?*, dalam *Jawa Pos*, 7 Juni 1993.

³⁴Kacung Marijan, *NU: Antara Elitis dan Populis*, dalam *Jawa Pos*, 8 Juni 1993.

realitas yang diharuskan oleh ajaran yang di anut NU, di mana ulama memiliki kedudukan yang penting dan khas. Namun dalam gerakan-gerakannya, NU sudah pasti populis. Karena itu Kacung menyebutkan kecenderungan NU sebagai Elitisme-populis, Arief Affandi³⁴ menilai senada dengan Kacung. Hanya saja elitisme NU juga dilihatnya muncul dengan perilaku politiknya. Bagi Arief Affandi, persoalannya adalah karena pada saat ini NU masih berada pada masa transisi dalam sebuah transformasi yang belum usai dari orientasi dan peran politik ke nonpolitik.

Terlepas dari penilaian para pengamat ini, maka otokritik tokoh-tokoh muda NU itu dapatlah dipandang sebagai pertanda semakin matangnya komitmen terhadap khittah. Sebab, salah satu pertimbangan NU kembali ke khittah adalah bahwa orientasi politik yang berlebihan ternyata telah membuat NU mengabaikan kepentingan warganya. Dan selama sepuluh tahun ini hal tersebut coba untuk dikoreksi.

B. PERSEPSI TERHADAP KHITTAH

1. Di Kalangan Warga

Implikasi bahwa setelah kembali ke Khittah NU

³⁵Arief Affandi, *NU: Transformasi yang Belum Usai*, dalam *Jawa Pos*, 9 Juni 1993.

menanggalkan baju kepolitikan praktisnya dapat segera dipahami oleh warga NU, namun tidak demikian halnya dengan implikasi lain berupa netralitas NU terhadap ketiga orpol dan pembebasan warga untuk menentukan orientasi politiknya sendiri. Kesulitan terutama muncul di kalangan warga NU yang awam dan dengan tingkat pendidikan relatif.

Pada dasarnya, warga NU yang paternalistis telah terkondisikan untuk selalu meminta fatwa dan petunjuk dari ulama dalam menghadapi persoalan hidup mereka, termasuk saat menentukan pilihan politik. Adalah kecenderungan mereka untuk selalu berbuat dan bertindak secara kolektif dalam sebuah arahan yang jelas. Maka sesungguhnya pemberian kebebasan kepada warga untuk menentukan pilihan politiknya sendiri adalah bertentangan dengan pola pikir mereka yang paling esensial. Dan inilah yang terjadi setelah khittah.

Persoalannya terasa lebih sulit karena kurang dari tiga tahun setelah keputusan kembali ke khittah, warga NU harus sudah menguji-cobakan "kebebasan" yang didapatnya dalam pemilu 1987. Rupa-rupanya sebagian warga NU justru merasa asing dalam suasana yang tanpa arahan kolektif itu, sehingga mereka terdorong untuk terus mencerainya. Dalam konteks inilah secara kebetulan sekelompok elit NU mendengung-dengungkan kampanye

penggembosan PPP, sambil langsung maupun tidak langsung, menyerukan agar warga menyeberang kepada Golkar. Bagi warga yang kebingungan, tidak pelak inilah arahan yang mereka cari. Dan efek arahan yang menyimpang dari garis netralitas yang telah dirumuskan itu ternyata tidak bisa dikatakan singkat. Hingga saat ini masih banyak warga awam NU di daerah-daerah yang memiliki tafsiran hitam-putih terhadap khittah, bahwa sudah khittah berarti meninggalkan PPP, masuk Golkar.³⁵

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Bambang Santoso Haryono di daerah basis-basis NU di Malang pada akhir tahun 1989 menghasilkan kesimpulan bahwa masih banyak warga NU memiliki persepsi negatif terhadap keputusan politik Muktamar 1984, dalam arti belum mempunyai persepsi yang benar sesuai dengan jiwa keputusan itu.³⁶ Hal ini tidak terlepas dari banyaknya kyai NU yang enggan melepaskan aktivitas politik praktisnya dan yang dengan menggunakan kewibawaannya sebagai ulama masih mencoba menggiring warga NU untuk mengikuti sikap dan perilaku politiknya.

³⁵Wawancara Penyusun KH. Hasyim Muzadi, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur di kantornya pada tanggal 28 Juni 1997.

³⁶Lihat Bambang Santoso Haryono, Persepsi NU Terhadap Keputusan Politik Muktamar Situbondo 1984 (Thesis S-2 Fakultas Pasca Sarjana UGM, 1990)

Haryono mencoba mengukur persepsi warga NU berdasarkan tiga variabel: orientasi nilai-nilai keislaman, militansi organisasi, dan pendidikan. Dua variabel pertama masing-masing dibagi dalam kategori kuat, sedang, dan lemah. Lalu variabel ketiga dibagi dalam kategori pesantren dan non-pesantren. Salah satu temuannya tentang persepsi ke mana orientasi politik NU menurut warga adalah seperti terangkum dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1. Persepsi Warga tentang Orientasi Politik NU³⁷

Persepsi Warga NU (dalam %)

Latar belakang	Kategori	Bebas	Golkar	PPP	PDI
Orientasi	K	21,62	45,21	32,43	1,35
Nilai	S	22,58	48,39	29,03	0,00
Islam	L	42,50	45,00	4,00	2,50
Militansi	K	2,58	11,29	10,48	5,64
Organisasi	S	77,53	6,74	15,73	0,00

³⁸Disederhanakan dari Bambang Santoso Haryono, 1990, Tabel 2 (Lampiran).

si	L	13,15	29,73	56,76	0,00
Pendidik-	Pst	24,56	40,95	34,49	0,00
an	Non-Pst	36,70	25,32	31,65	6,30

Tabel di atas menunjukkan bahwa sedikit sekali warga yang memiliki persepsi bahwa NU membebaskan warganya untuk memilih sendiri orientasi politik mereka. Hanya di kalangan mereka yang memiliki militansi organisasi pada kategori kuat dan sedang, yang mereka yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang tinggi terhadap program-program NU, terdapat mayoritas warga yang memiliki persepsi sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dengan angka 72,58 % dan 77,53 %. Sementara di kalangan warga yang berpendidikan non-pesantren, mereka yang memiliki persepsi benar menunjukkan angka 36,70 %. Terbanyak dibandingkan dengan persepsi lain pada kalangan ini, namun bukan mayoritas. Kelompok-kelompok lain kebanyakan memiliki persepsi orientasi ke Golkar. Seperti mereka yang memiliki orientasi nilai-nilai keislaman kuat, 45,21 % manunjuk ke Golkar, disusul PPP 32,43 % lalu disalurkan bebas sebanyak 21,62 %, dan pada urutan terakhir, seperti pada semua kelompok kategori lain, menunjuk pada FDI sebanyak 1,35 %. Uniknya, justru di kalangan warga yang mempunyai kategori militansi

organisasi rendah persepsi bahwa warga NU sebaiknya menyalurkan aspirasi politiknya kepada PPP menunjukkan angka cukup tinggi, yaitu sebanyak 56,76 %.

Banyak warga yang condong ke Golkar untuk sebagian dapat dipandang sebagai indikator akan signifikannya pengaruh aksi eksodus sejumlah tokoh-tokoh NU di PPP ke Golkar di tahun 1987 terhadap pola pikir dan persepsi warga NU. Mereka yang memiliki kecenderungan ini pada umumnya memberikan alasan bahwa memilih Golkar kita tidak akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan dari aparatnya.³⁸

Sementara tentang PPP, kebanyakan (47 %) ternyata menilainya bukan lagi partai Islam. Sedangkan sebanyak 46 % memiliki persepsi bahwa PPP masih merupakan partai Islam, dan sisanya sebanyak 7 % menyatakan ragu-ragu.³⁹

Selanjutnya, meskipun pada umumnya warga NU dapat segera memahami keputusan untuk meninggalkan kepolitikan praktis, namun ternyata penilaian mereka terhadap keputusan tersebut masih agak negatif, setidaknya sampai tahun 1989, saat berakhirnya periode sosialisasi khittah.

Haryono menemukan bahwa hanya 53,5 % warga yang

³⁹I b i d., h. 102

⁴⁰I b i d., h. 107

menyatakan penilaian bahwa keputusan NU untuk meninggalkan politik praktis adalah keputusan yang tepat. 34,4 % menilai bahwa keputusan tersebut sama sekali tidak tepat, dan sisanya yang 12,1 % menyatakan masih ragu-ragu.⁴⁰ Angka 53,5 % yang menilai tepat memang adalah yang terbesar dibandingkan dengan angka lainnya. Namun jika diasumsikan bahwa semestinya NU mampu menyamakan persepsi seluruh warganya untuk menerima secara baik keputusan untuk meninggalkan politik praktis itu, maka angka tersebut masih dapat dikatakan kecil. Alasan yang dikemukakan oleh mereka yang menilai bahwa keputusan itu tepat adalah:⁴¹

1. Karena sebagai organisasi yang terjun dalam kegiatan politik praktis, di mana tokoh-tokoh NU terlalu lama bergaul dengan politik dan berpola hidup serba politik, tugas-tugas NU di bidang kemasyarakatan dan keagamaan banyak terkesampingkan.
2. Seringnya terjadi kemelut dalam tubuh NU yang disebabkan oleh persaingan untuk menjadi pimpinan dengan tujuan mendapatkan fasilitas

⁴¹ *I b i d.*, h. 113.

⁴² *I b i d.*, h. 113.

dari pemerintah atau untuk mengarahkan jalan ke kursi DPR/MPR maupun, dahulu, eksekutif.

3. NU sebenarnya kekurangan kader-kader profesional sehingga tidak dapat mempertahankan kekuasaan politik yang diperolehnya. Hal ini membuat kedudukan NU menjadi lemah sekaligus menjadikannya sebagai permainan dalam arena politik praktis.

Sementara mereka yang menilai tidak tepat agaknya didasari oleh pemikiran bahwa banyak keuntungan yang terpaksa ditinggalkan NU setelah tidak lagi berpolitik. Itu berarti, bagi mereka khittah sebenarnya membawa kerugian kepada NU. Pola pikir semacam ini dikritik oleh Menurutnya, adanya sementara kalangan, bahwa di dalam NU sendiri, yang menilai NU mengalami kerugian setelah khittah adalah karena mereka melihat kondisi NU setelah kembali ke Khittah dengan "tacamata non-khittah."⁴²

Apapun, angka-angka di atas yang menggambarkan masih banyaknya warga yang mempunyai persepsi cenderung negatif ternyata kian menguatkan asumsi bahwa masa yang

⁴²Wawancara Penyusun dengan KH. Imron Hamzah, Ketua Umum Syuriah PNU Jawa Timur di kantornya pada tanggal 28 Juni 1997.

telah berjalan sebenarnya masih belum memadai bagi sosialisasi khittah di kalangan mereka.

2. Di Kalangan Elit

Di samping pada kalangan warga yang relatif awam, perbedaan persepsi juga muncul di kalangan elit NU. Namun di antara kedua macam kerancuan persepsi tersebut, terdapat perbedaan-perbedaan dalam hal penyebab timbulnya serta akibat yang dibawanya. Jika di kalangan warga tiadanya keseragaman persepsi terutama berkaitan dengan pemahaman mereka yang belum tepat, yang lenih jauh berhulu pada sosialisasi khittah yang belum memadai, maka di kalangan elit keragaman itu timbul lebih dikarenakan perbedaan kepentingan mereka masing-masing. Dengan tujuan memudahkan pencapaian kepentingannya, banyak diantara mereka yang membuat penafsiran sendiri-sendiri tentang khittah. Dengan demikian keaneka-ragaman penafsiran terhadap khittah memang berbanding lurus dengan kepentingan parsial yang muncul. Artinya, semakin banyak kepentingan, semakin beragam pula persepsi yang timbul. Sedemikian rupa korelasi itu sehingga silang pendapat yang ada selalu dibangun di atas dasar komitmen terhadap khittah.

Namun jika diperhatikan dengan cermat, semua persilangan kepentingan yang ada akan ditemukan polanya

dalam peta konflik "tradisional" NU yang berkutubkan "ulama" dan "politisi". Mereka yang tergolong dalam kelompok ulama non-politik menganggap bahwa kembali ke khittah berarti sama sekali kembali ke pesantren dan meninggalkan semua bentuk orientasi politik. Sementara pada ujung ekstrem lainnya kalangan politisi menghendaki agar NU tetap berpolitik praktis. Masing-masing kelompok ini sering sekali antara satu dengan lainnya menyerang dan menuduh mereka di seberangnya sebagai tidak memahami khittah, sambil sesekali bersama-sama mengarahkan serangannya pada kelompok moderat yang muncul sebagai arus baru di NU pasca 1984, yang pada umumnya dicitrakan pada figur Abdurrahman wahid. Dan meskipun keduanya sama-sama tidak tepat ditinjau dari semangat yang dirumuskan tahun 1984,⁴³ namun masing-masing selalu membangun argumen yang sangat konseptual untuk memberikan justifikasi bagi penafsirannya terhadap khittah.

KH. As'ad Syamsul Arifin misalnya, suatu ketika menilai bahwa "masih banyak *nahdi* ... yang belum menghayati makna kembali ke khittah ... yang kyai,

⁴⁴Tentang asumsi studi ini terhadap semangat khittah, yang kurang lebih adalah garis tengah antara kedua polarisasi penafsiran di atas, akan di gambarkan lebih jauh dalam Bab selanjutnya di belakang.

mengambang.⁴⁷

Meskipun secara umum perbedaan persepsi mengikuti alur ulama versus politisi, namun di dalam masing-masing kelompok itupun sebenarnya kerap terjadi pula perbenturan pendapat, yang paling jelas terdapat di kalangan yang disebut terakhir. Contoh yang sangat mudah untuk diambil adalah tentang sikap mereka terhadap PPP. Mahbub Djunaedi misalnya, adalah orang yang menganggap bahwa untuk benar-benar membuktikan komitmen barunya, maka NU harus keluar dari PPP, dan menunjukkan bahwa partai itu akan berbeda sekali setelah ditinggalkan NU. Karena itulah ia melakukan manuver politik yang begitu mengesankan di seputar Pemilu 1987. Lalu Yusuf Hasyim, ketika NU sesudah kembali kepada khittah, berarti telah bercerai dengan PPP, sehingga "menengok" saja ke PPP adalah haram.⁴⁸ Akan tetapi mereka yang masih tetap di PPP rupanya terus meneguhkan diri dengan posisi defensifnya, seperti KH. Syamsuri Badawi yang menuding bahwa mereka yang dengan alasan khittah meninggalkan PPP dan memilih Golkar sebenarnya "tidak kembali ke khittah".

⁴⁸Lihat Nuddin Lubis, *Jangan Berlarut-larut Warga NU Mengambang*, dalam S. Sinansari Ecip (ed.) **NU dalam Tantangan** (Jakarta: Penerbit Al-Kautsar, 1989), h. 37-46.

⁴⁹Betapa tidak konsistennya Yusuf Hasyim, terkesan begitu jelas bahwa ia di kemudian hari kembali merambah akses ke PPP.

tetapi kembali ke *khintah* (isi perut)".⁴⁹

Jika perbenturan kepentingan dan persilangan persepsi itu berpagar cukup jelas, barangkali tidak terlalu menjadi persoalan. Namun kalangan elit NU ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki masa pendukung di belakangnya, dan dengan penafsirannya masing-masing banyak di antara mereka yang melakukan distorsi informasi di mana-mana.⁵⁰ Dan seperti disebutkan pada bagian terdahulu, hal inilah yang turut membelokkan persepsi di kalangan warga dari garis yang seharusnya. Bahkan aparat pemerintah di tingkat bawah banyak pula yang terkena imbasnya.

Di samping itu, penafsiran di kalangan ulama NU sendiri bahwa NU harus sepenuhnya kembali ke pesantren sebenarnya adalah paradoksial terhadap elan politik yang sedemikian rupa terbentuk dalam watak kebanyakan elit NU. Keengganan untuk menyadari bahwa dengan *khittahnya* NU masih dapat berpolitik meski dengan makna dan dimensi baru yang berbeda daripada sebelumnya hanya berarti penekanan yang berlebihan terhadap elan itu, yang menyebabkan lalu berusaha mencari *exhaust* lain. Di

⁵⁰Lihat *Tempo*, 11 April 1987.

⁵¹Sebagaimana wawancara Penyusun dengan KH. Imran Hamzah, *Ibid*.

sinilah kiranya dapat dijelaskan mengapa banyak ulama NU terutama di daerah-daerah yang cenderung untuk membangun kedekatan pribadi dengan inti kekuasaan baik pada tingkat lokalnya masing-masing maupun di tingkat pusat.

C. KONSEKUENSI ORGANISATORIS INTERNAL KHITTAH

Keputusan Mukhtamar 1984 tentang Khittah NU dalam salah satu bagiannya menyebutkan bahwa,

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang membawakan faham keagamaan, maka ulama sebagai matarantai pembawa faham Islam Ahlussunnah wal-Jamaah selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi.⁵¹

Bahwa nama organisasi yang secara harfiah berarti Kebangkitan Ulama telah menggambarkan kedudukan sentral para ulama di situ, adalah jelas. Namun bahwa Mukhtamar 1984 merasa perlu secara eksplisit membuat penegasan kembali tentang hal itu, adalah didasari tujuan yang cukup jelas pula. Sejak pada tahun 1952 secara resmi menyatakan diri sebagai partai politik, peran ulama dalam NU sedikit demi-sedikit tersisih dan mulai tersaingi kalau tidak boleh mengatakan terungguli, oleh peran kelompok politisi. Maka ketika NU kembali ke Khittah, dan memutuskan

⁵² Lihat Keputusan Mukhtamar XVII NU No. 02/MNU-27/1984 Tentang Khittah Nahdlatul Ulama, Butir 7.

ditinggalkannya politik praktis, pengembalian otoritas ulama dalam kepemimpinan NU menjadi salah satu konsekuensinya. Konsekuensi ini memberi Muktamar 1984 sebuah sebutan retorik sebagai "kebangkitan kembali ulama". Sebuah retorika bersirat harapan yang hingga sekarang belum juga berhasil, untuk tidak menilainya gagal terwujud.

Ketidak-berhasilan itu untuk sebagian dapat dijelaskan karena di dalam NU saat ini ternyata sedang berlangsung dua macam proses yang satu sama lain sebenarnya agak berlawanan. Di satu sisi NU ingin mengembalikan otoritas ulama dalam teras kepemimpinannya, yang berarti bahwa ulama sebagai kelompok elit kembali menjadi pembuat kebijakan utama yang nyaris tidak dapat dibantah seperti lazim terjadi pada akar budaya NU. Sementara pada sisi lain NU juga menunjukkan keinginan untuk mewujudkan kehendak demokratisasi masyarakat yang akan dimulai dari konteks makro NU. *Cocern* pada demokratisasi yang menseyogikan mekanisme *bottom-up decision making* itu tentu tidak dapat dikatakan sejalan dengan upaya pemberian otoritas penuh kepada ulama yang menjadikan keputusan organisasi selalu mengalir dari atas ke bawah. Yang diperlukan NU akhirnya adalah membuat pola yang tetap agar kedua proses itu bisa berjalan sekaligus dengan selaras. Namun yang selama ini terjadi, keduanya selalu berjalan susul-menyusul.

Tahun 1984, proses pengembalian otoritas ulama

dimulai di Mukhtamar Situbondo. Tujuan ini diamankan dengan dibuatnya tata cara baru dalam pemilihan pengurus dengan konsep Ahlul Halli wal-'Aqdi. Konsep yang berasal dari ide KH. Ahmad Siddiq ini semula tidak begitu disukai oleh kalangan muda NU, yang menginginkan tata-cara lama berupa pemilihan formatur dan selanjutnya memilih pengurus satu per-satu tetap digunakan.⁵² Dalam tata cara baru itu ditunjuk KH. As'ad Syamsul Arifin sebagai ketua, dan dia selanjutnya menunjuk enam orang kyai senior lainnya.⁵³ Ketua dan para anggota Ahlu halli wal-'aqdi inilah yang kemudian menyusun kepengurusan NU.

Bahwa kemudian ada *politicking* yang diwarnai *vested interest* tertentu dalam mekanisme semacam itu agaknya sudah dapat diduga. Komposisi pengurus baru, khususnya Tanfidziyah, yang dibentuk ternyata tidak sesuai dengan aspirasi kelompok muda NU, yang sebelumnya telah mengajukan usulan formasi kepengurusan pada ahlul halli wal-'aqdi. Beberapa figur yang diharapkan duduk dalam pengurus harian turun ke pengurus pleno, atau sebaliknya. Yang paling mengejutkan, pada jabatan Sekjen diletakkan Anwar Nurris,

⁵³Lihat Arief Mudatsir, *Dari Situbondo Menuju NU Baru: Sebuah Catatan Awal*, dalam **Prisma** Nomor Ekstra, 1984, h. 140.

⁵⁴Waktu itu KH. As'ad menunjuk KH. Ali Maksud, KH. Masykur, KH. Siansuri, KH. Hasan Ahmad, KH. Romli, dan KH. Roffi Mahfudz sebagai anggota.

yang dekan dengan KH. As'ad Syamsul Arifin. Ia adalah merupakan orang yang belum begitu dikenal dalam arus baru kelompok muda NU, dan kurang dapat digolongkan sebagai ekseponen khittah.⁵⁴ Namun kendati Anwar Nurris dinilai bukan orang yang tepat untuk menduduki jabatan di Tanfidziyah, keputusan tersebut mesti diterima. Sebuah gambaran betapa upaya agak ekstrem bagi pengembalian otoritas ulama sebenarnya terimplikasikan kurang teraktualisasikannya aspirasi yang datang dari bawah.

Jika komitmen untuk mengembalikan peran ualam pada porsi yang semestinya lalu dimanifestasikan sebagai dibukanya kesempatan bagi kelompok ulama untuk menguasai semua struktur kepengurusan NU, hal ini tentu saja akan menimbulkan reaksi-balik yang menghambatnya. Upaya yang terlalu ekstrem ke arah itu lalu, oleh arah baru NU, mulai di bawa ke titik moderat, sekaligus dalam alur demokratisasi NU. Pada Mukhtamar 1989, Abdurrahman Wahid berhasil mendesakkan dua usulan perubahan yang cukup penting. Pertama, dirubahnya mekanisme pemilihan pengurus baru. Sistem ahluul halli wal-'aqdi ditinggalkan dan digunakan model formatur terpilih. Dalam cara ini, memang

⁵⁵Bandingkan dengan Ghaffar Rahman dan Ichwan Sam, dua orang yang secara berturut-turut menjadi Sekjen setelah Anwar Nurris, yang pada tahun 1984 turut ambil bagian dalam Majelis 24.

tokoh seperti KH. As'ad Syamsul Arifin untuk mengendalikan sendiri proses pemilihan pengurus jadi berkurang, dan dialihkan kepada utusan wilayah-wilayah dan cabang-cabang secara keseluruhan.⁵⁵ Kedua, dilakukan perombakan terhadap AD/ART NU, dimana mustasyar yang sebelumnya menjadi lembaga sendiri disubordinasikan ke dalam lembaga Syuriah. Rupanya anggota Mustasyar banyak melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya, sehingga dengan diletakkan di bawah Syuriah, pelaksanaan tugas mereka akan selalu berada di bawah koordinasi Rais Aam.

Perombakan ini praktis membawa hubungan antar struktur dalam NU semakin mendekati bentuk ideal. Pada prinsipnya, secara formal lembaga tempat kiprah ulama di NU adalah Syuriah, yang merupakan pimpinan tertinggi. Jadi sebenarnya upaya yang sangat tepat dalam rangka pengembalian peran Syuriah sangat jauh dari apa yang diatur secara mentereng dalam pasal 30 ART NU bahwa Syuriah adalah "pimpinan tertinggi yang berfungsi sebagai pembina, pengendali, pengawas dan penentu kebijakan Syuriah. Dominasi Tanfidziyah ini sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu mengherankan, mengingat lembaga ini sebagai pelaksana harian jalannya organisasi sudah tentu adalah yang pertama bersinggungan dengan persoalan ekstern, dan

⁵⁶Lihat *Tempo*, 2 Desember 1989

karenanya memberikan respons yang lebih awal daripada Syuriah. Itulah sebabnya Tanfidziyah selalu tampak lebih menonjol.

Namun kelemahan pada sisi Syuriah sendiri bukannya tidak menjadi penyebab bagi persoalan di fungsi itu. Yang paling sering dikritik oleh kalangan ulama NU sendiri adalah, orang-orang di Syuriah pada umumnya kurang mampu mengantisipasi permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, antara lain akibat pwenafsiran yang terlalu tekstual terhadap kitab-kitab kuning yang menjadi acuan mereka. Ketidak-mampuan ini sedikit banyak akhirnya menimbulkan rasa inferior Syuriah berhadapan dengan Tanfidziyah.

Empat tahun sebelum Mukhtamar Krapyak, kelemahan Syuriah itu dibicarakan dalam sebuah halaqah Syuriah saat berlangsung Konferensi Wilayah NU Jawa Timur di Lumajang. Dalam halaqah tersebut merekomendasikan:

1. Bidang keilmuan yang perlu dimiliki Syuriah NU adalah:
 - a. Ilmu Naqliyah, meliputi Aqidah, Syariah, dan Akhlaq.
 - b. Ilmu Kauniyah, meliputi ilmu kemasyarakatan (politik, ekonomi dan budaya), ilmu sejarah, dan ilmu manajemen.
2. Sikap yang perlu dimiliki Syuriah:
 - a. Berwawasan rahmatan lil-alamina sesuai dengan risalah

rasul.

- b. Tasamuh, tawazun, dan tawasuth, sesuai dengan khittah 1926.
- c. Memiliki kepedulian terhadap perkembangan masyarakat dan lingkungan hidupnya.
- d. Tanggap dan mampu merspons setiap tantangan yang ada di masyarakat.
- e. Memiliki sikap kepeloporan, berani melakukan hal-hal baru yang lebih maslahat.

3. Kemampuan berorganisasi Syuriyah:

- a. Memiliki kemampuan memimpin dan mengelola organisasi sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita jam'iyah.
- b. Mampu memberikan pemecahan praktis terhadap masalah yang timbul dalam masyarakat.
- c. Mampu menjabarkan dan mewujudkan tanggung-jawab agama dalam setiap perkembangan yang terjadi.
- d. Memiliki kemampuan membaca perubahan dan kecenderungan yang terjadi dalam organisasi maupun masyarakat.
- e. Mampu membina hubungan dengan berbagai pihak, ke dalam maupun ke luar.

Akan tetapi setelah hampir lima tahun berjalan, rumusan itu ternyata tidak berhasil memberikan perubahan yang terlalu berarti. Terlebih setelah meninggalnya KH. Ahmad Siddiq, Syuriyah jadi terasa kembali sulit meletakkan

diri pada superioritas yang semestinya. Sepeninggal KH. Ahmad Siddiq, praktis tidak ada figur ulama Syuriah yang memiliki kualitas pribadi cukup untuk mampu setidaknya mengimbangi Abdurrahman Wahid di Tanfidziyah.

Di samping masalah kualitas personel di atas, mekanisme pemilihan anggota inti PBNU agaknya dapat dipandang sebagai penyebab lain sulitnya pengembalian supremasi Syuriah, walaupun tidak terlalu menentukan. Proses pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah yang sama-sama dilakukan secara langsung, sedikit banyak tentu menimbulkan efek rasa kesepadanan antara keduanya. Karena itu lalu muncul pemikiran tentang perubahan tata cara pemilihan pengurus. Pemilihan pasti bukan kembali pada konsep ahlulhalli wal-'aqdi yang mengandalkan otoritas elit kyai senior dan terkesan kurang demokratis. Gagasan yang muncul belakangan tampaknya adalah jalan tengah antara mekanisme ahlul halli wal-'aqdi dan pemilihan langsung. Yakni, cukup para pengurus Syuriah saja yang dipilih secara langsung dalam muktamar. Lalu Syuriah yang telah terbentuk ini bersidang untuk memilih Ketua Umum Tanfidziyah. Gagasan ini memang tampak cukup menarik, tapi rupanya masih belum bisa diterapkan. Ketika hendak diujicobakan dalam konperensi Wilayah NU Jawa Tengah pada bulan April 1994, konsep ini ditolak oleh sebagian besar peserta konferensi yang justru masih menginginkan ketua Tanfidziyah

PW NU dipilih langsung.⁵⁶

Sementara itu sebuah gagasan lain yang cukup mengejutkan datang dari Abdurrahman Wahid. Dalam sebuah seminar, mengemukakan pemikiran tentang perampingan organisasi NU. Salah-satu bagian dari gagasan perampingan itu adalah penghapusan jabatan Ketua Umum. Perubahan semacam ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan antara Syuriah dan Tanfidziyah.⁵⁷ Namun, apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid ternyata tidak dapat terealisasi dalam Mukhtamar 1994 kemarin. Perubahan AD/ART akhirnya tidak terjadi. Namun sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Abdurrahman Wahid, sudah terkompensasi dengan rapat-rapat intern yang secara periodik dilaksanakan dalam NU. Rapat intern pengurus Tanfidziyah, Syuriah secara sendiri-sendiri, maupun bersama, sebenarnya telah dapat meminimalisir superioritas Tanfidziyah di atas Syuriah.⁵⁸ Bagaimana mekanisme pertanggung-jawaban perjalanan NU dalam kepengurusan Tanfidziyah yang secara umum disampaikan para

⁵⁷Wawancara Penyusun dengan Drs. H. Ali Maschan Muesa, Wakil Ketua Katib Syuriah PWNU Jawa Timur di kediamannya tanggal 26 Juni 1997.

⁵⁸Seminar dimaksud adalah *Peranan Pesantren dalam Meningkatkan Etos Kerja* di Cirebon tanggal 18 Juni 1993, lihat pada **Aula**, Juni 1993

⁵⁹Seperti dikemukakan oleh Drs. H. Ali Maschan Moesa dalam sebuah wawancara dengan penyusun di kantor dan kediamannya pada tanggal 21 Juni 1997.

forum muktamar, tidak akan juga mengurangi kewibawaan Syuriah apabila ditopang dengan kemampuan individual masing-masing. Senioritas dan kapabelitas pengaruh seorang Ketua Umum Syuriah, sebenarnya harus dipertimbangkan demi kembalinya kebangkitan ulama dalam Nahdlatul Ulama.
